

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan perekonomian negara yang kuat maka harus diiringi pula dengan pengelolaan keuangan negara yang professional, sehingga dapat terciptanya penyelenggaraan negara yang baik. Keuangan negara merupakan penunjang utama dalam membiayai urusan negara, oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang baik sangat esensial demi mencapai tujuan negara (Hadi & Sriyani, 2021). Untuk mendukung upaya tersebut maka dikeluarkanlah tiga peraturan terkait keuangan negara, antara lain ialah Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan adanya ketiga peraturan tersebut pemerintah diwajibkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara yang dijabarkan dalam susunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Hal tersebut ditujukan agar terdapat penyajian informasi keuangan yang andal sehingga memberi dampak yang baik bagi perekonomian Indonesia.

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terdapat sebuah komponen yang disebut neraca. Neraca tersebut berisi gambaran posisi keuangan suatu entitas pada tahun anggaran. Didalam neraca tersebut terdapat salah satu komponen penting yaitu aset tetap. Berdasarkan PSAP 07, aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun atau dua belas bulan agar dapat digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu dalam PSAP Nomor 07, disebutkan klasifikasi aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Pengelolaan aset tetap bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan menciptakan nilai tambah, sehingga dapat digunakan sebagai modal awal bagi pemerintah dalam mendukung tugas dan fungsi pemerintah sebagai pemberi layanan publik kepada masyarakat (Pinatik et al., 2015). Aset tetap memiliki nilai yang cukup tinggi sehingga penyajiannya memiliki dampak yang signifikan terhadap kewajaran laporan keuangan, oleh karena itu penyajian aset tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun pada nyatanya, meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang pengelolaan aset tetap, masih ada satker yang melakukan penyimpangan dalam mengelola aset tetap, hal tersebut tentunya akan merugikan negara apabila terjadi terus-menerus. Permasalahan-permasalahan tersebut dijelaskan pada Buletin Teknis SAP Nomor 15.

Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara merupakan satker di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang bertugas untuk melayani

masyarakat mengenai agraria/pertanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara memiliki sejumlah aset tetap yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara bertanggungjawab untuk mengelola aset tetapnya mulai dari klasifikasi, pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penyusutan aset tetap, penghentian dari penggunaan dan pelepasan aset tetap, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang ditetapkan.

Dilihat dari urgensi aset tetap terhadap keuangan negara dan masih adanya permasalahan dalam pengelolaan aset tetap membuat penulis melakukan peninjauan atas penerapan akuntansi aset tetap di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara agar mengetahui apakah penerapan aset tetapnya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tinjauan yang akan dilakukan ialah dengan membandingkan data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara baik berupa data primer ataupun wawancara dengan peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan akuntansi aset tetap. Peraturan dan ketentuan yang akan digunakan sebagai pembanding yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap yang merupakan lampiran dari PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Bultek No. 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua. Hasil tinjauan tersebut dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan atas Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat latar belakang di atas, penulis mengikhtisarkan beberapa rumusan masalah antara lain:

- a. Bagaimana klasifikasi aset tetap di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara?
- b. Bagaimana pengakuan aset tetap di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara?
- c. Bagaimana pengukuran aset tetap di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara?
- d. Bagaimana penyusutan aset tetap di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara?
- e. Bagaimana penghentian penggunaan dan pelepasan aset tetap di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara?
- f. Bagaimana penyajian dan pengungkapan aset tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang akan diperoleh dari penulisan karya tulis ini antara lain ialah:

- a. Untuk mengetahui klasifikasi aset tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara
- b. Untuk mengetahui pengakuan aset tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara
- c. Untuk mengetahui pengukuran aset tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara

- d. Untuk mengetahui penyusutan aset tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara
- e. Untuk mengetahui penghentian dan pelepasan aset tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara
- f. Untuk mengetahui penyajian dan pengungkapan aset tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis berfokus untuk meninjau penerapan akuntansi aset tetap di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara. Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan masalah dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini pada pengertian, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian dan pelepasan, penyajian dan pengungkapan, serta Permasalahan dan kendala dalam penerapan akuntansi aset tetap.

Data yang dibutuhkan untuk melakukan tinjauan terhadap penerapan akuntansi aset tetap tersebut, ialah laporan keuangan khususnya neraca, dan data lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan aset tetap di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara pada tahun anggaran 2020 karena laporan keuangan tersebut sudah selesai dan diaudit.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya tulis tugas akhir akhir ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan manfaat pada berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi penulis dapat menambah pemahaman terkait penerapan akuntansi pemerintah pusat khususnya terkait aset tetap pada suatu satker, serta sebagai

sarana untuk mengimplementasikan teori-teori akuntansi pemerintah pusat yang telah dipelajari selama perkuliahan. Selain itu Karya Tulis Tugas Akhir ini juga dibuat untuk memenuhi salah satu kewajiban penulis selaku mahasiswa sebagai syarat kelulusan dari Politeknik Keuangan Negara STAN.

- b. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, dengan diadakannya peninjauan ini dapat menjadi evaluasi agar terus memperbaiki kualitas dalam pengelolaan aset tetap pada tahun anggaran selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat atau instansi pemerintah lainnya, diharapkan dapat memberikan informasi terkait penerapan akuntansi aset tetap dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengembangkan teori terkait aset tetap.

1.6 Sistematika Penulisan

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

HALAMAN PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI KARYA TULIS
TUGAS AKHIR

PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penulisan

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

1.5 Manfaat Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Aset Tetap

2.1.2 Klasifikasi Aset Tetap

2.1.3 Pengakuan Aset Tetap

2.1.4 Pengukuran Aset Tetap

2.1.5 Penyusutan Aset Tetap

2.1.6 Penghentian Penggunaan dan Pelepasan Aset Tetap

2.1.7 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

3.2 Gambaran Umum Objek Penulisan

3.2.1 Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara

3.2.1.1 Profil Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara

3.2.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Strategis Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Utara

3.2.1.3 Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten
Lampung Utara

3.2.1.4 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten
Lampung Utara

3.2.2 Gambaran Penerapan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Lampung Utara

3.2.2.1 Pengertian Aset Tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Lampung Utara

3.2.2.2 Klasifikasi Aset Tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Lampung Utara

3.2.2.3 Pengakuan Aset Tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Lampung Utara

3.2.2.4 Pengukuran Aset Tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Lampung Utara

3.2.2.5 Penyusutan Aset Tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Lampung Utara

3.2.2.6 Penghentian Penggunaan dan Pelepasan Aset Tetap pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara

3.2.2.7 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Lampung Utara

3.3 Pembahasan Hasil

3.3.1 Tinjauan atas Pengertian Aset Tetap pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Utara

3.3.2 Tinjauan atas Klasifikasi Aset Tetap pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Utara

- 3.3.3 Tinjauan atas Pengakuan Aset Tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara
- 3.3.4 Tinjauan atas Pengukuran Aset Tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara
- 3.3.5 Tinjauan atas Penyusutan Aset Tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara
- 3.3.6 Tinjauan atas Penghentian Penggunaan dan Pelepasan Aset Tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara
- 3.3.7 Tinjauan atas Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara

BAB IV SIMPULAN

4.1 Simpulan

4.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT RISET

RIWAYAT HIDUP PENULIS